

**ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN
KEGIATAN INFRASTRUKTUR DI DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi*



Oleh :

NAMA : RISMA CANTIKA SASTRA

NPM : 220411077

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2026

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 28
Bulan : Juli
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA


Dr. DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

SEKRETARIS


SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

1. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si (Pembimbing I) 
2. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji I) 
3. RISVANDI, S.Pd.I, M.Si (Anggota Penguji II) 


Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM
PERENCANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR DI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NAMA : RISMA CANTIKA SASTRA
NPM : 220411077
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



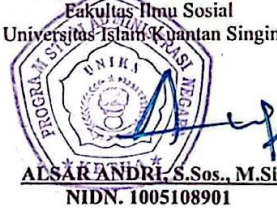
ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

PEMBIMBING II



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : RISMA CANTIKA SASTRA
NPM : 220411077

Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini benar-benar merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini bersifat asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, maupun Doktor) baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun perguruan tinggi lainnya.

Seluruh isi dalam skripsi ini merupakan hasil pemikiran, gagasan, serta penelitian penulis sendiri dengan tetap mendapatkan arahan dan bimbingan dari dosen pembimbing. Apabila terdapat kutipan atau pendapat dari karya orang lain, maka telah dicantumkan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan kaidah karya ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian dari ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 2026



RISMA CANTIKA SASTRA
NPM. 220411077

MOTTO

“Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”.

(HR. Muslim)

“Ilmu adalah Cahaya yang akan menerangi jalan kehidupan dan mengangkat derajat orang yang mencarinya ”.

“Menuntut ilmu merupakan ibadah yang mulia dan menjadi jalan untuk meraih keberhasilan di dunia dan akhirat”.

“Dengan ilmu, seseorang akan lebih dihargai, dihormati, dan mampu memberikan manfaat bagi orang lain”.

PERSEMBAHAN

Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, **Ayahanda Badi Sastrawan** dan **Ibunda Ramadanis**, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, serta kepada sahabat dan teman-teman yang telah membantu dan menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Billahi fi Sabili al-haq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

**RISMA CANTIKA SASTRA
NPM. 220411077**

KATA PENGANTAR

رومكيدعم لاسلامه ت ا ك ربوالله اة

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul : **“Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan kegiatan infrastruktur, serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan masukan bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa dukungan moril, materil, maupun motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pdi., M.Pdi** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Sarjan M, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak **Alsar Andri, S.Sos., M.Si** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

4. Bapak **Alsar Andri, S.Sos., M.Si** selaku dosen pembimbing I penulis yang telah mendidik penulis, membimbing, memberikan kritikan, masukan dan saran serta motivasi kepada penulis sehingga selesainya penelitian ini.
5. Bapak **Sarjan M, S.Sos., M.Si** selaku pembimbing II penulis yang telah mendidik penulis, membimbing, memberikan kritikan, masukan dan saran serta motivasi kepada penulis sehingga selesainya penelitian ini.
6. Bapak **Desriadi, S.Sos., M.Si** selaku Penasehat Akademik yang banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan serta motivasi penulis dalam kesuksesan penulisan penelitian ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh Dosen/Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik, memberikan pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membantu penulis sehingga lancarnya proses administrasi dalam menyelesaikan pendidikan akademik penulis.
9. Teman-teman seperjuangan di kelas Administrasi Negara Kelas A Angkatan 2022, Sukses Untuk Kita Semua.
10. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi dihaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan, serta data yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu berikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berdampingan.

رومكيدعم لاسلأ وحمه تاكربوالله اة

Teluk Kuantan, 28 Juli 2026

Penulis

RISMA CANTIKA SASTRA
NPM. 220411077

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK INDONESIA.....	xvi
ABSTRACT INGGRIS.....	xvii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Pustaka	11
2.1.1. Teori Ilmu Administrasi Negara.....	11
2.1.2. Teori Kebijakan Publik.....	13
2.1.3. Teori Pemerintahan Daerah	16
2.1.4. Teori Pembangunan dan Administrasi Pembangunan.....	19
2.1.5. Teori Sistem Informasi Manajemen	21
2.1.6. Teori Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	26

2.1.7. Teori Perencanaan Infrastruktur Daerah	30
2.1.8. Teori Pengambilan Keputusan	33
2.2. Kerangka Pemikiran	35
2.3. Hipotesis	35
2.4. Defenisi Operasional	36
2.4.1. Penginputan Data SIPD	36
2.4.2. Pemanfaatan Fitur Perencanaan SIPD	36
2.4.3. Kendala Penggunaan SIPD	36
2.5. Operasional Variabel	37
BAB III : METODE PENELETIAN	
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2. Informan	38
3.3. Sumber Data	40
3.3.1. Data Primer	40
3.3.2. Data Sekunder	40
3.4. Fokus Penelitian	41
3.5. Lokasi Penelitian	41
3.6. Metode Pengumpulan Data	41
3.6.1. Pengamatan	41
3.6.2. Wawancara	41
3.6.3. Dokumentasi	42
3.6.4. Gabungan	42
3.7. Metode Analisis Data	42
3.7.1. Pengumpulan Data	42
3.7.2. Reduksi Data	43
3.7.3. Penyajian Data	43
3.7.4. Penarikan Kesimpulan	43
3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	44
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	45

4.2. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46
4.3. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	47
4.4. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	48
4.5. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	50
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Identitas Responden.....	56
5.1.1. Responden Menurut Jenis Kelamin	56
5.1.2. Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	57
5.1.3. Responden Menurut Tingkat Umur	58
5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.....	58
5.2.1. Penginputan Data SIPD	59
5.2.2. Pemanfaatan Fitur Perencanaan SIPD	68
5.2.3. Kendala Penggunaan SIPD	77
5.3. Analisis Pembahasan Peneliti tentang Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi	86
BAB VI : PENUTUP	
6.1. Kesimpulan.....	91
6.2. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
II. 1	: Operasional Variabel Penelitian Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi	37
III. 1	: Daftar Informan Penelitian Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi	39
III. 2	: Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi	44
V. 1	: Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	56
V. 2	: Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	57
V. 3	: Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II. 1	: Kerangka Pemikiran Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi	35
IV. 1	: Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I : Daftar Wawancara Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi	97
II : Dokumentasi Penelitian tentang Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi	100
III : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 062/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025 tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara	102
IV : Surat Balasan Riset Penelitian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 600/PUPR-SEKR/IV/2026/1027 tentang Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi	103
V : Catatan Bimbingan Proposal dan Skripsi Penelitian tentang Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi	104

VI	: Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Proposal Penelitian tentang Penelitian tentang Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi	106
VII	: Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Skripsi Penelitian tentang Penelitian tentang Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.....	107
VIII	: Daftar Riwayat Hidup Penulis	108

ABSTRAK

ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :

**Risma Cantika Sastra
NPM.220411077**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan kegiatan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Fokus penelitian meliputi penginputan data SIPD, pemanfaatan fitur perencanaan SIPD, serta kendala yang dihadapi dalam penggunaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas PUPR, Kepala Sub Bagian Umum, serta pegawai dari Bidang Pemograman, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang dan Jasa Konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD dalam perencanaan kegiatan infrastruktur secara umum telah berjalan dengan baik. Data yang diinput ke dalam sistem sudah cukup lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perencanaan. Fitur perencanaan SIPD juga dimanfaatkan secara rutin dalam penyusunan program dan kegiatan infrastruktur. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti gangguan server, jaringan internet yang tidak stabil, serta proses verifikasi dan persetujuan data. Meskipun demikian, kendala tersebut masih dapat diatasi sehingga SIPD tetap mendukung proses perencanaan kegiatan infrastruktur secara optimal.

Kata Kunci : SIPD, Perencanaan Infrastruktur

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE USE OF THE REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM (SIPD) IN INFRASTRUCTURE ACTIVITY PLANNING AT THE PUBLIC WORKS AND SPATIAL PLANNING OFFICE OF KUANTAN SINGINGI REGENCY

By :

**Risma Cantika Sastra
NPM.220411077**

This study aims to analyze the use of the Regional Government Information System (SIPD) in infrastructure activity planning at the Public Works and Spatial Planning Office of Kuantan Singingi Regency. This research is motivated by the importance of utilizing information systems to support an effective, efficient, transparent, and accountable regional development planning process. The focus of this study includes SIPD data input, the utilization of SIPD planning features, and the obstacles encountered in its implementation. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of the Head of the Public Works and Spatial Planning Office, the Head of the General Subdivision, and staff members from the Programming, Water Resources, Highways, Human Settlements, and Spatial Planning and Construction Services divisions. The results indicate that the use of SIPD in infrastructure activity planning has generally been implemented well. The data entered into the system are sufficiently complete and in accordance with planning requirements. SIPD planning features are also regularly utilized in the preparation of infrastructure programs and activities. However, several obstacles remain, including server disruptions, unstable internet networks, and the data verification and approval process. Nevertheless, these obstacles can still be overcome, allowing SIPD to continue supporting the infrastructure activity planning process optimally.

Keywords : SIPD, Infrastructure Planning

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Henry Fayol perencanaan pembangunan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, efektif, dan tepat sasaran. Perencanaan yang baik memungkinkan pemerintah daerah menyusun prioritas program, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan memastikan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa perencanaan adalah fungsi manajemen yang paling fundamental karena berhubungan langsung dengan proses penetapan tujuan, strategi, dan kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. (dalam Siagian, 2012 : 57).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan era digitalisasi, pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan. Teknologi informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan sumber daya manusia yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan memungkinkan integrasi proses administrasi, perencanaan, dan pelaporan pembangunan secara lebih efisien dan transparan. (Jogiyanto, 2017 : 15).

Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah menjadi landasan penting dalam mendukung inovasi sistem informasi berbasis digital.

Salah satu bentuk penerapannya adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. penerapan sistem informasi di lingkungan pemerintah merupakan wujud transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. (Mardiasmo, 2018 : 67).

Untuk memperkuat perencanaan dan tata kelola pemerintahan daerah, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat SIPD), yang secara resmi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD. SIPD merupakan sistem informasi digital yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan secara menyeluruh pada pemerintahan daerah. Tujuan utama dari sistem ini adalah meningkatkan akurasi data, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD memiliki beberapa fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Mendukung proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Mengintegrasikan proses penganggaran daerah.
3. Menstandarkan dan mengintegrasikan data pemerintahan daerah.
4. Mendukung pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
5. Mendukung pelaporan serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa SIPD bukan hanya sistem administratif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam menjamin integrasi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan daerah secara terpadu.

Penerapan SIPD secara nasional juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang tersebut menekankan pentingnya integrasi perencanaan pembangunan dan ketersediaan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.

Di Kabupaten Kuantan Singingi telah mulai menerapkan SIPD sejak tahun 2020 secara bertahap. Pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfoss) telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (selanjutnya disingkat PUPR). Dinas PUPR merupakan organisasi perangkat daerah teknis yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan drainase yang menjadi penopang konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Kuansing.go.id, 2023).

Pada tahun 2024, Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan usulan anggaran infrastruktur sebesar Rp655.000.000.000 kepada pemerintah pusat, yang menunjukkan pentingnya akurasi data dan perencanaan yang terintegrasi melalui SIPD. Meskipun sistem ini sudah tersedia, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan pemahaman teknis operator, kurang optimalnya

pemanfaatan fitur SIPD, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi secara mendalam. (Kuansing.go.id, 2024).

Kendala utama dalam implementasi SIPD di daerah mencakup kurangnya pelatihan teknis bagi operator organisasi perangkat daerah serta keterbatasan infrastruktur jaringan internet yang memadai. Hal ini menyebabkan kesalahan penginputan data, keterlambatan pelaporan, dan ketidaksinkronan dokumen perencanaan dengan realisasi kegiatan. Akibatnya, proses perencanaan pembangunan daerah menjadi kurang efisien dan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran kebijakan publik. (Aflah dan Lestari, 2021 : 112).

Efektivitas sistem informasi dalam pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan struktur organisasi, budaya kerja, dan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem secara optimal. Implementasi SIPD bukan hanya masalah teknis, tetapi juga aspek manajerial dan kelembagaan. Seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi seperti SIPD menjadi bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Digitalisasi ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya perencanaan yang partisipatif, transparan, serta berbasis data aktual. (Widodo, 2018 : 79).

Selain itu, menurut Dunn peran SIPD tidak hanya sebatas alat bantu administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam mendukung kebijakan publik berbasis data. kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik dengan mempertimbangkan

data dan analisis yang akurat. Hal ini berarti bahwa sistem informasi seperti SIPD menjadi pondasi penting agar kebijakan pembangunan dapat dirumuskan berdasarkan bukti (*evidence-based policy*), bukan sekedar asumsi atau kepentingan. (dalam Wahab, 2003 : 7).

Ketersediaan data yang akurat dalam SIPD akan membantu pemerintah daerah melakukan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penganggaran tahunan secara terpadu. Selain itu, SIPD tidak hanya berfungsi sebagai media penginputan data, tetapi juga sebagai system yang mengintegrasikan seluruh proses perencanaan pembangunan daerah dalam satu platform digital. Melalui integrasi tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyusun program, kegiatan, subkegiatan, dan penganggaran berdasarkan data yang terintegrasi sehingga mendukung pengambilan Keputusan yang lebih tepat, efektif, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun, ketika sistem informasi ini belum dimanfaatkan secara maksimal, maka akan muncul ketimpangan antara perencanaan dan realisasi pembangunan. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek, tumpang tindih kegiatan antar organisasi perangkat daerah, serta rendahnya efektivitas penggunaan anggaran. Dalam konteks Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi, kendala tersebut berdampak langsung terhadap proses pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi yang berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada sistemnya, tetapi juga pada kemampuan aparatur dalam mengoperasikan dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di SIPD. Banyak pegawai yang belum memahami secara menyeluruh alur kerja sistem, terutama dalam tahap penyusunan program, penginputan data, serta pelaporan kegiatan tahunan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang mendesak agar sistem ini dapat dijalankan dengan optimal. Kompetensi aparatur merupakan faktor kunci dalam mendukung keberhasilan birokrasi menghadapi perubahan sistem administrasi berbasis teknologi, karena keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kesiapan dan kemampuan manusia yang mengelolanya. (Sedarmayanti, 2017 : 154).

Selain peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), aspek akuntabilitas juga menjadi hal penting dalam penerapan SIPD. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dibiayai oleh masyarakat melalui anggaran negara. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga hasil nyata dari kinerja instansi yang harus disampaikan secara transparan dan objektif. Dengan adanya SIPD, pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. (Mahmudi, 2019 : 45).

Lebih lanjut, keberhasilan implementasi SIPD juga bergantung pada tingkat dukungan kebijakan dari pimpinan daerah dan koordinasi antar perangkat daerah. Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dan konsistensi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, dukungan Bupati dan kepala dinas menjadi faktor penting agar penggunaan SIPD tidak hanya sekadar formalitas administrasi, melainkan benar-benar menjadi alat bantu utama dalam proses perencanaan pembangunan. (Tangkilisan, 2017 : 92).

Penerapan SIPD yang belum optimal berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap efektivitas pembangunan daerah. Data yang tidak sinkron dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, serta kesalahan dalam perencanaan anggaran. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan SIPD menjadi kebutuhan mendesak agar pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi dapat berjalan lebih transparan, terarah, dan efisien.

Dari perspektif administrasi publik, pemanfaatan teknologi informasi seperti SIPD merupakan bagian dari transformasi menuju *e-government* atau pemerintahan berbasis elektronik. *E-government* tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan SIPD tidak hanya berdampak pada peningkatan

kinerja internal pemerintah daerah, tetapi juga pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). (Indrajit, 2016 : 48).

Namun, tanpa pengawasan yang baik dan peningkatan kompetensi pegawai secara berkala, sistem informasi seperti SIPD akan sulit mencapai tujuan idealnya. Keberhasilan organisasi publik sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang profesional, motivasi kerja yang tinggi, dan lingkungan kerja yang mendukung. Dalam konteks Dinas PUPR, diperlukan strategi peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan teknis, pendampingan, dan pembentukan tim khusus yang menangani integrasi data SIPD agar pelaksanaan program dapat lebih optimal. (Siagian, 2016 : 73).

Kendala lain yang sering muncul dalam pelaksanaan SIPD di daerah adalah kurangnya koordinasi lintas sektor. Banyak data pembangunan yang belum terintegrasi antar instansi, sehingga proses sinkronisasi kegiatan menjadi terhambat. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa kegagalan dalam koordinasi merupakan salah satu faktor utama rendahnya efektivitas kebijakan publik di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme komunikasi dan kerja sama antar instansi dalam bentuk forum koordinasi teknis yang secara rutin membahas kendala dan solusi pelaksanaan SIPD. (Nugroho, 2017 : 101).

Penelitian mengenai penggunaan SIPD dalam perencanaan pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan publik, karena kualitas perencanaan infrastruktur akan memengaruhi pelayanan dasar, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, Dinas PUPR

Kabupaten Kuantan Singingi menjadi subjek yang relevan untuk dikaji, mengingat perannya sebagai perangkat daerah teknis yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap penggunaan SIPD pada instansi tersebut penting dilakukan guna mengetahui sejauh mana SIPD mampu mendukung perencanaan pembangunan yang efektif, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.

Dengan berbagai kendala tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menilai efektivitas penggunaan SIPD dalam perencanaan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan teknis, kendala operasional, dan strategi optimalisasi penggunaan SIPD.

Dari perspektif akademik, penelitian ini berkontribusi terhadap literatur administrasi publik, kebijakan digital, dan tata kelola pemerintahan daerah. Hasil penelitian akan memperkaya pemahaman mengenai bagaimana teknologi informasi mendukung perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan berbasis data.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari permasalahan utama belum optimalnya penggunaan SIPD dalam mendukung proses perencanaan kegiatan infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan

Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan SIPD dalam perencanaan kegiatan infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya pada aspek penginputan data, pemanfaatan fitur perencanaan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang berjudul Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik dan teknologi informasi pemerintahan daerah, khususnya dalam hal analisis sistem informasi seperti SIPD dalam mendukung perencanaan pembangunan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan efektivitas dan efesiensi penggunaan SIPD, mengatasi kendala teknis yang dihadapi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem dalam mendukung perencanaan kegiatan infrastruktur yang lebih akurat dan akuntabel.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Teori Ilmu Administrasi Negara

Menurut Suwarno administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *administratie* (bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik dan pencatatan secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bila diperlukan lagi, baik secara terpisah, maupun tidak terpisah, dan segala sesuatu yang bersifat teknis, ketatausahaan (*clerial work*) jadi pengertian administrasi sebagai ketatausahaan (*clerial work*) merupakan sebagian kecil dari administrasi. (dalam Afifudin, 2015 : 3).

Menurut Atmosudirjo administrasi adalah sesuatu yang terdapat dalam sesuatu organisasi tersebut, sehingga organisasi itu tidak dapat berkembang. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (dalam Ngusmanto, 2015 : 15).

Menurut Suminta mengatakan bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi apapun bentuk organisasinya baik organisasi publik maupun organisasi bisnis. (dalam Pasolong, 2016 : 3).

Administrasi negara merupakan sebuah sistem yang dipakai suatu negara guna membantu pemerintahan dalam melengkapi keperluan masyarakat. Pada kehidupan modern seperti saat ini, negara lebih mengarah untuk berusaha memenuhi keperluan masyarakat, terutama dalam permasalahan pelayanan kesejahteraan rakyat, maka dibutuhkan adanya administrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut.

Dalam dunia administrasi, unsur-unsur kunci yang sering diangkat oleh para ahli meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Perencanaan berperan sebagai landasan dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, sementara pengorganisasian memastikan bahwa sumber daya dan struktur organisasi disusun dengan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Pengarahan melibatkan pemberian instruksi, motivasi, dan bimbingan kepada karyawan agar dapat bekerja secara optimal. Pengawasan memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan melakukan koreksi jika terdapat penyimpangan. Sementara itu, pengambilan keputusan menjadi inti dari setiap tahapan administrasi, di mana keputusan strategis diambil berdasarkan analisis mendalam untuk memastikan efektivitas dan efisiensi organisasi. Secara keseluruhan, kelima unsur ini bekerja secara sinergis untuk memastikan operasional organisasi berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. (Sahya, 2016 : 1).

Menurut Dimock dan Dimock administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari salah satu keluarga

hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Administrasi negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses. Oleh sebab itu, sebagai suatu ilmu yang diperoleh dari kedua ilmu pengetahuan ini, administrasi negara menghendaki dua macam syarat jika hendak dipahami. Pertama, perlu mengetahui sesuatu mengenai administrasi umum. Kedua, harus diakui bahwa banyak masalah administrasi negara timbul dalam kerangka politik. (dalam Muhammad, 2019 : 29).

2.1.2. Teori Kebijakan

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang bisa dilalukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. (Engkus, 2022 : 20-22).

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. (Herdiana, 2018 : 17).

Menurut Nugroho R. menyatakan bahwa kebijakan publik dalam kepastakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang

mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. (dalam Uddin, 2017 : 8).

Menurut Said Zainal Abidin kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya. (dalam Uddin, 2017 : 10).

Adapun beberapa pengertian kebijakan publik menurut para ahli (dalam Uddin, 2017 : 34-35) diantaranya :

1. Irfan Islamy

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. (dalam Uddin, 2017 : 34-35).

2. Thomas R. Dye

Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak untuk dilakukan. (dalam Uddin, 2017 : 34-35).

3. George C. Edwards III & Ira Sharkansky

Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. (dalam Uddin, 2017 : 34-35).

4. W.I. Jenkins

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seseorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor. (dalam Uddin, 2017 : 34-35).

5. James E. Anderson

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. (dalam Uddin, 2017 : 34-35).

6. Chief J.O. Udoji

Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. (dalam Uddin, 2017 : 34-35).

Kebijakan publik adalah arah tindakan yang telah ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor politik untuk mengatasi persoalan tertentu. Kebijakan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan direncanakan dengan maksud dan tujuan yang jelas oleh aktor dalam sistem politik. Selain itu, kebijakan saling berkaitan satu sama lain, merupakan tindakan nyata pemerintah (bukan hanya keinginan), bisa bersifat positif maupun negatif, serta harus berlandaskan hukum agar memiliki kekuatan mengikat. (Rusdiadi, 2017 : 15).

2.1.3. Teori Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 yang menyatakan bahwa : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 5 yang menyatakan bahwa : pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Pengertian tentang Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu : pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan

yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah ; kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut ; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan Peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas peraturan daerah dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Merujuk pada pengertian tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menempatkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. (Ani Sri Rahayu, 2018 : 1-4).

Pada prinsipnya pengertian tentang pemerintahan daerah tersebut tidak jauh berbeda antara pengertian yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan pengertian tentang pemerintahan daerah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang pada intinya adalah pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan daerah, diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4. Teori Pembangunan dan Administrasi Pembangunan

Menurut Todaro pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensional, keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari ukuran ekonomi saja tetapi juga dari ukuran non-ekonomi. (dalam Ngusmanto, 2015 : 25).

Menurut Todaro pembangunan secara luas adalah proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara

keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. (dalam Ngusmanto, 2015 : 27).

Menurut Siagian pembangunan merupakan rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan demikian, ide pokok pembangunan mengandung makna bahwa :

- a. Pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir.
- b. Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus.
- c. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.
- d. Pembangunan mengarah kepada modernitas.
- e. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multidimensional. (dalam Suryono, 2010 : 46).

Menurut Mostopadidjaya administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. (dalam Afiffudin, 2010 : 51).

Fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan

menyingkirkan ancaman. Disiplin ilmu administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain yaitu :

- a. Orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik.
- b. Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. (Afiffudin, 2010 : 64).

Menurut Sondang P. Siagian administrasi pembangunan didefinisikan sebagai serangkaian usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini didasarkan pemahaman bahwa dalam administrasi pembangunan ada dua pengertian yang membentuknya yakni administrasi dan pembangunan. Administrasi dimaknai sebagai proses dilaksanakannya keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pembangunan dimaknai sebagai serangkaian usaha yang dilakukan untuk mewujudkan perubahan dan pertumbuhan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan bangsa dan negara yang menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*). (dalam Sahya Anggara et.al, 2016 : 24).

2.1.5. Teori Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen adalah sistem yang diterapkan dalam suatu organisasi untuk mendukung keputusan dan informasi yang dihasilkan dibutuhkan

oleh semua tingkatan manajemen atau dengan kata lain teknik pengelola informasi dalam suatu organisasi. (Ramadhania, 2014 : 328).

Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia/mesin yang telah terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. (Sutiyadi, 2017 : 45).

Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. (Priharto, 2019 : 32).

Sistem informasi manajemen adalah sistem yang mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan manajemen dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan organisasi. Sistem ini berperan penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu agar pimpinan dapat melakukan koordinasi, evaluasi, serta pengambilan keputusan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. (Kusrini, 2014 : 3).

Menurut O'Brien & Marakas tujuan penerapan sistem informasi manajemen adalah untuk menyediakan informasi yang mendukung efisiensi dan efektivitas kegiatan organisasi, mempercepat proses perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan, serta memfasilitasi evaluasi kinerja semua bagian organisasi agar tujuan strategis dan operasional dapat tercapai secara optimal dan konsisten dengan visi dan misi organisasi. (dalam Pratama, 2016 : 15).

Keberhasilan sistem informasi manajemen sangat bergantung pada kemampuan sistem dalam menyediakan informasi yang tepat, lengkap, dan dapat dipercaya bagi manajemen di semua tingkatan, serta pada dukungan manajemen, ketersediaan teknologi yang memadai, prosedur yang jelas, dan pelatihan bagi pengguna, sehingga sistem informasi manajemen dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta daya saing organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis. (Munir, 2016 : 30).

Sistem informasi manajemen merupakan kombinasi antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan prosedur data yang berfungsi mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Dengan penerapan sistem informasi manajemen yang baik, organisasi dapat meningkatkan efektivitas koordinasi, efisiensi kerja, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks pemerintahan daerah, sistem informasi manajemen menjadi dasar penting bagi pengembangan SIPD karena keduanya memiliki fungsi serupa, yaitu menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk mendukung perencanaan dan kebijakan publik. (Jogiyanto, 2017 : 45).

Menurut Laudon dan Laudon sistem informasi manajemen terdiri dari tiga komponen utama yang saling berhubungan, yaitu *input* (masukan), *process* (proses), dan *output* (keluaran).

Komponen *input* berkaitan dengan proses pengumpulan dan pemasukan data ke dalam sistem, *process* menggambarkan tahapan pengolahan data menjadi

informasi, sedangkan *output* merupakan hasil akhir berupa informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Ketiga komponen ini menjadi dasar dalam penelitian ini, karena menggambarkan bagaimana sistem informasi, termasuk SIPD, bekerja dalam mendukung proses perencanaan kegiatan infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi. (dalam Sutabri, 2012 : 10).

Dalam pelaksanaannya, SIPD tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fungsi dan mekanisme kerja SIPD menjadi penting sebagai dasar dalam menganalisis penggunaannya dalam perencanaan kegiatan infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan kerangka teori sistem informasi manajemen menurut Laudon dan Laudon, sistem informasi terdiri dari komponen *input*, *process*, dan *output*.

Namun, dalam penelitian ini analisis difokuskan pada aspek penggunaan sistem, sehingga indikator yang digunakan meliputi penginputan data (*input*), pemanfaatan fitur perencanaan (*process*), serta kendala penggunaan SIPD. Sementara itu, aspek output tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

1. *Input* (penginputan data SIPD)

Komponen *input* dalam sistem informasi manajemen merupakan tahap awal yang sangat menentukan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem. *Input* berkaitan dengan proses pengumpulan, pencatatan, dan pemasukan data mentah

ke dalam sistem informasi. Data yang dimasukkan harus lengkap, akurat, dan relevan agar dapat diolah secara optimal pada tahap selanjutnya.

Input dalam penelitian ini diartikan sebagai proses penginputan data perencanaan kegiatan infrastruktur ke dalam SIPD oleh Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi. Data tersebut meliputi data program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, serta kebutuhan anggaran yang akan diusulkan dalam perencanaan pembangunan. Ketepatan dan ketelitian dalam proses *input* data menjadi faktor penting karena kesalahan pada tahap ini dapat berdampak pada keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

2. *Process* (pemanfaatan fitur perencanaan SIPD)

Komponen *process* merupakan tahap pengolahan data yang telah diinput menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Proses ini mencakup pengelompokan data, pengolahan, analisis, serta penyajian data dalam bentuk informasi yang sistematis dan terstruktur.

Dalam konteks penelitian ini, *process* diwujudkan melalui pemanfaatan fitur perencanaan yang tersedia dalam SIPD, seperti fitur penyusunan rencana kerja, pengelompokan program dan kegiatan, serta sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Melalui fitur-fitur tersebut, data yang telah diinput diolah menjadi dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan fitur perencanaan SIPD yang optimal diharapkan dapat membantu Dinas PUPR dalam menyusun perencanaan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data.

3. Kendala Penggunaan SIPD (sebagai faktor dalam proses sistem informasi)

Selain *input* dan *process*, dalam penerapan sistem informasi sering ditemukan berbagai kendala yang dapat memengaruhi kinerja sistem. Kendala ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari faktor yang memengaruhi kelancaran proses dalam sistem informasi manajemen.

Dalam penelitian ini, kendala penggunaan SIPD diposisikan sebagai bagian dari faktor yang memengaruhi proses pengolahan data dalam sistem informasi. Kendala tersebut dapat berupa keterbatasan jaringan internet, kurangnya pemahaman operator terhadap alur kerja dan fitur SIPD, serta keterbatasan kemampuan teknis dalam mengoperasikan sistem. Kendala-kendala ini berpotensi menghambat proses pengolahan data dan berdampak pada keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan maupun ketidaksesuaian informasi yang dihasilkan oleh sistem.

2.1.6. Teori Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

SIPD merupakan sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai alat bantu utama dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan daerah secara digital dan terintegrasi. SIPD didesain untuk menyatukan informasi dari seluruh perangkat daerah dalam satu sistem nasional berbasis web, sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih sinkron, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD. Setiap pemerintah daerah wajib menggunakan SIPD dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fungsi SIPD secara resmi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, sehingga fungsi-fungsi SIPD yang digunakan dalam penelitian ini bersifat resmi dan normatif.

1. Fungsi perencanaan pembangunan daerah

SIPD berfungsi mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan terintegrasi dari usulan program hingga penetapan prioritas berbasis kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.

2. Fungsi penganggaran daerah

SIPD menghubungkan perencanaan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga terdapat keterkaitan antara program, kegiatan, dan alokasi anggaran. Hal ini menjaga konsistensi rencana pembangunan serta mendukung penganggaran yang efisien dan berbasis kinerja.

3. Fungsi standarisasi dan integrasi data pemerintahan daerah

SIPD berfungsi menstandarkan dan mengintegrasikan data pemerintahan daerah melalui kode dan indikator kerja yang seragam. Kondisi ini meningkatkan

keakuratan data serta memudahkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengambilan keputusan.

4. Fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

SIPD digunakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan, menilai capaian kinerja, dan mengidentifikasi kendala pembangunan. Informasi tersebut menjadi dasar evaluasi serta perbaikan kebijakan pembangunan daerah.

5. Fungsi pelaporan dan akuntabilitas pemerintahan daerah

SIPD berfungsi membantu penyusunan laporan pembangunan dan keuangan daerah secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi ini mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Dengan sistem ini, setiap satuan kerja perangkat daerah memiliki akses yang sama terhadap data, sehingga koordinasi dan pengawasan menjadi lebih mudah dan akuntabel. Selain itu, penerapan SIPD diharapkan meningkatkan kualitas perencanaan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya di tingkat daerah.

SIPD memungkinkan integrasi seluruh data perencanaan dan penganggaran dari berbagai satuan kerja perangkat daerah, sehingga koordinasi antar unit kerja lebih efektif dan pengawasan penggunaan anggaran lebih transparan. Hal ini mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data akurat serta meminimalkan kesalahan input dan duplikasi data. (Sutiyadi, 2017 : 50).

SIPD tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan, tetapi juga sebagai alat bantu pimpinan daerah dalam menilai progres kegiatan, mengevaluasi realisasi anggaran, dan menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan

masyarakat dan rencana strategis daerah. Dengan demikian, SIPD menjadi instrumen strategis yang berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan. (Purwanto, 2019 : 12).

Penggunaan SIPD mendukung transparansi bagi masyarakat, karena laporan kegiatan dan penggunaan anggaran dapat diakses secara sistematis. Hal ini meningkatkan akuntabilitas publik dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran di tingkat pemerintah daerah. (Hidayat, 2019 : 21).

SIPD berperan sebagai sarana integrasi antar sektor pembangunan, sehingga satuan kerja perangkat daerah dapat menyelaraskan rencana dan kegiatan mereka dengan rencana strategis daerah. Integrasi ini memperkuat koordinasi dan memastikan pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik berjalan optimal. (Moeljodiharjo, 2015 : 75).

Selain itu, kualitas data, kemudahan akses, dan relevansi informasi yang disediakan SIPD menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas perencanaan pembangunan daerah. (Jogiyanto, 2017 : 33).

Dengan demikian, SIPD bukan hanya alat administrasi digital, tetapi merupakan instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan evaluasi pembangunan, sehingga tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem ini menjadi fondasi penting dalam mencapai perencanaan infrastruktur yang terintegrasi, mendukung koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah, serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

2.1.7. Teori Perencanaan Infrastruktur Daerah

Perencanaan infrastruktur daerah merupakan proses sistematis dan strategis dalam merancang pembangunan sarana dan prasarana fisik yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan masyarakat, pengumpulan data, penentuan skala prioritas, hingga penyusunan program kerja yang realistis dan terukur. Perencanaan infrastruktur yang efektif tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata ruang wilayah.

Perencanaan infrastruktur daerah harus berbasis pada data yang valid, mempertimbangkan kondisi geografis, potensi wilayah, serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antar perangkat daerah juga menjadi kunci dalam merancang infrastruktur yang terintegrasi dengan pembangunan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. (Kurniawan, 2021 : 139-140).

Dalam praktiknya, perencanaan infrastruktur di daerah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan secara bertahap dan terstruktur, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dokumen-dokumen ini menjadi dasar untuk merumuskan

kegiatan infrastruktur secara menyeluruh, mulai dari perencanaan awal hingga implementasi.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 Ayat 1 menekankan pentingnya prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan kegiatan pembangunan termasuk bidang infrastruktur.

Penggunaan SIPD dalam perencanaan infrastruktur memungkinkan transparansi dalam penganggaran, mempermudah pengawasan, serta mendorong keterlibatan masyarakat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dengan demikian, perencanaan infrastruktur yang semula bersifat manual dan rentan kesalahan kini dapat dikelola secara digital, efektif, dan akuntabel. (Yusuf, 2022 : 60-61).

Perencanaan infrastruktur daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan fisik dan sosial di suatu wilayah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana publik yang mampu mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks pemerintah daerah, perencanaan infrastruktur harus memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan pemerataan agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan Masyarakat. (Pasolong, 2016 : 89).

Perencanaan infrastruktur merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat, perumusan tujuan, penentuan prioritas kegiatan, penyusunan rencana pembiayaan,

pelaksanaan, dan evaluasi hasil kegiatan. Tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan secara sistematis agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan visi pembangunan daerah. Dengan kata lain, perencanaan infrastruktur tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan. (Soetomo, 2018 : 45).

Dari perspektif administrasi publik, perencanaan infrastruktur termasuk dalam fungsi manajemen yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses penetapan tujuan dan langkah-langkah strategis untuk mencapai hasil tertentu dengan mempertimbangkan potensi dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, keberhasilan perencanaan infrastruktur daerah sangat bergantung pada kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola informasi, mengambil keputusan secara tepat, serta melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan. (Siagian, 2012 : 73).

Namun, dalam pelaksanaannya, perencanaan infrastruktur daerah kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya data yang valid, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Permasalahan ini seringkali mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem informasi dan koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan perencanaan

berbasis data (*evidence-based planning*) yang lebih efisien dan akuntabel. (Fauzan, 2021 : 64).

2.1.8. Teori Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dengan mengatakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pendekatan yang sistematis itu menyangkut pengetahuan tentang hakikat alternatif yang dihadapi. Dari uraian tentang pengambilan keputusan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud pengambilan keputusan adalah “awal dari kegiatan, baik kegiatan perorangan maupun organisasi”. Tanpa keputusan tanpa kegiatan dalam artian bahwa tidak kegiatan kalau tidak ada keputusan. Pengumpulan fakta dan data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, analisis masalah dengan mempergunakan fakta dan data, mencari alternatif pemecahan, menganalisis setiap alternatif sehingga ditemukan alternatif yang paling rasional, dan penilaian dari hasil yang dicapai sebagai akibat keputusan yang diambil. (Siagian, 2014 : 39).

Menurut Higgins mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah kegiatan yang paling dari semua kegiatan karena di dalamnya pimpinan terlibat, dan malahan kata Hoy dan Miskel merupakan pertanggung jawaban utama dari semua administrator melalui proses tempat keputusan-keputusan di buat. (dalam Salusu, 2016 : 47).

Pengertian pengambilan keputusan antara lain dikemukakan oleh tiga orang ahli di bawah ini. (dalam Hasan, 2004 : 10). :

1. George R. Terry

Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. (dalam Hasan, 2004 : 10).

2. S.P. Siagian

Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. (dalam Hasan, 2004 : 10).

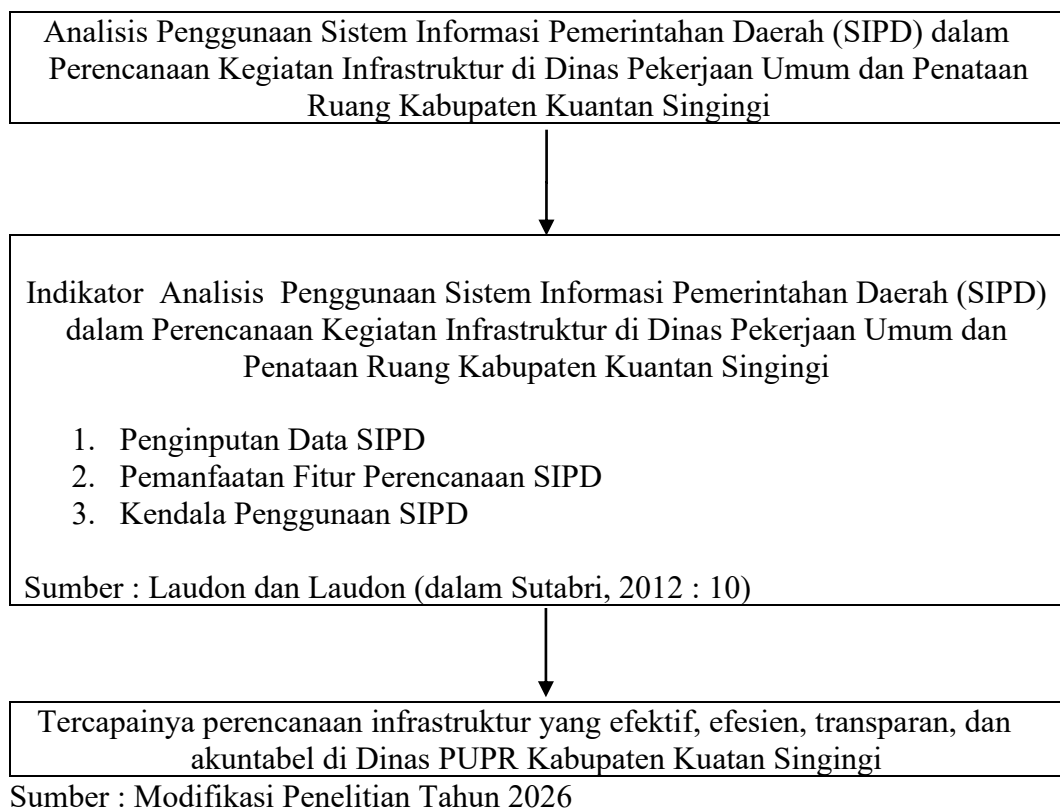
3. James A.F. Stoner

Pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. (dalam Hasan, 2004 : 10).

Pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi (prakiraan) mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi. (suharnan, 2005 : 194).

2.2. Kerangka Pemikiran

Gambar II. 1 : Kerangka Pemikiran Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi



2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang belum dibuktikan melalui penelitian. Berdasarkan observasi awal, peneliti menduga bahwa penggunaan SIPD dalam perencanaan kegiatan infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara optimal. Hal ini diduga karena masih adanya kendala dalam penginputan data, pemanfaatan fitur perencanaan, serta hambatan teknis dalam penggunaan sistem.

2.4. Defenisi Operasional

Untuk mengukur tingkat penggunaan SIPD dalam perencanaan kegiatan infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti menggunakan beberapa indikator yang bersumber dari:

2.4.1. Penginputan Data SIPD

Menurut Laudon dan Laudon penginputan data SIPD merupakan proses memasukkan data kegiatan infrastruktur ke dalam sistem SIPD secara tepat waktu, lengkap, dan akurat oleh operator atau staf. Proses ini bertujuan memastikan tersedianya data yang valid sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas. (dalam Sutabri, 2012 : 10).

2.4.2. Pemanfaatan Fitur Perencanaan SIPD

Menurut Laudon dan Laudon pemanfaatan fitur perencanaan SIPD adalah penggunaan fitur SIPD oleh pegawai untuk mendukung penyusunan kegiatan infrastruktur, seperti penganggaran dan penjadwalan. Tingkat efektivitas penggunaannya menunjukkan optimalisasi SIPD dalam proses perencanaan. (dalam Sutabri, 2012 : 10).

2.4.3. Kendala Penggunaan SIPD

Menurut Laudon dan Laudon kendala penggunaan SIPD adalah hambatan yang dihadapi oleh pengguna sistem dalam operasional sehari-hari. Hambatan ini dapat berupa kendala teknis (seperti sistem error, jaringan lambat), kendala prosedural (alur kerja atau standar operasional prosedur yang tidak efisien), dan kurangnya pelatihan teknis yang mengakibatkan pegawai belum maksimal dalam menggunakan SIPD secara efektif. (dalam Sutabri, 2012 : 10).

2.5. Operasional Variabel

Tabel II. 1 : Konsep Operasional Variabel Penelitian Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
PUPR	SIPD	1. Penginputan Data SIPD	1. Berapa lama waktu dalam penginputan data.	Ordinal
			2. Apakah data selalu lengkap saat diinput.	
			3. Bagaimana ketepatan data yang diinput.	
		2. Pemanfaatan fitur perencanaan SIPD	1. Seberapa sering fitur perencanaan digunakan	Ordinal
			2. Fitur mana yang paling membantu perencanaan.	
			3. Bagaimana kemudahan akses fitur perencanaan.	
		3. Kendala penggunaan SIPD	1. Kendala teknis apa yang sering terjadi.	Ordinal
			2. Bagaimana kestabilan sistem saat digunakan.	
			3. Hambatan prosedural apa yang di hadapi.	

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menguji hipotesis atau teori. Berdasarkan kerangka teori terkait penelitian kualitatif yang disusun, jenis penelitian ini berfokus pada data baru berupa kalimat-kalimat dengan makna mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang diamati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang terkumpul selama *observasi* oleh peneliti di lapangan. (Sugiyono, 2014 : 9-10).

3.2. Informan

Informan penelitian ini adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek suatu penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. (Sugiyono, 2019 : 300).

Adapun informan dalam penelitian ini lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III. 1 : Daftar Informan Penelitian Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi

No	Unsur Informan	Jumlah		Persentase %
		Informan	Key Informan	
1	Kepala Dinas PUPR	1	1	2%
2	Kepala Sub Bagian Umum	1	1	2%
3	Pegawai bidang Bina Marga	1	1	2%
4	Pegawai bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi	1	1	2%
5	Pegawai bidang Sumber Daya Air	1	1	2%
6	Pegawai bidang Cipta Karya	1	1	2%
7	Pegawai bidang Pemograman	1	1	2%
Jumlah		7	7	14%

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026

Berdasarkan tabel informan di atas, teknik penarikan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam penggunaan SIPD serta memahami proses perencanaan kegiatan infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh bersifat mendalam, fokus, dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penggunaan SIPD dalam perencanaan infrastruktur. (Sugiyono, 2019 : 218).

3.3. Sumber Data

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis dan sumber data dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

3.3.1. Data Primer

Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti ini juga melakukan survei dan wawancara dengan beberapa narasumber sesuai dengan keperluan penelitian. (Sugiyono, 2018 : 256).

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap informan di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi yang terlibat dalam penggunaan sistem SIPD pada perencanaan kegiatan infrastruktur.

3.3.2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari catatan, buku, majalah, jurnal, artikel, buku-buku teori, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. (V. Wiratna Surjarweni, 2018 : 6).

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi, seperti dokumen RPJMD, RKPD, Renja Perangkat daerah, dokumen SIPD, struktur organisasi, serta peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

3.4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada penginputan data, pemanfaatan fitur perencanaan, dan kendala dalam penggunaan SIPD di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5. Lokasi Penelitian

Peneliti menentukan lokasi penelitian di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) yang tepatnya di kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1. Pengamatan

Pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas, perilaku, atau kondisi nyata yang diteliti. Pengamatan dilakukan secara sistematis menggunakan pedoman agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. (Sugiyono, 2010 : 145-146).

3.6.2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan informan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan relevan dengan tujuan penelitian. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan informan memberikan jawaban. (Sugiyono, 2018 : 137).

3.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata Latin *docore* yang berarti mengajar. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang mendukung penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. (Sugiyono, 2014 : 240).

3.6.4. Gabungan

Gabungan adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau pembandingan data yang diperoleh. Gabungan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data, seperti pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, agar data yang diperoleh lebih lengkap, valid, dan dapat dipercaya. (Sugiyono, 2010 : 330).

3.7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun, mengorganisasikan, dan mengolah data hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi secara sistematis melalui pengelompokan data, penyusunan unit, sintesis, penyusunan pola, serta penarikan kesimpulan. Proses ini bertujuan agar data dapat dipahami dan diverifikasi, serta digunakan untuk membangun makna, konsep, dan teori secara induktif berdasarkan temuan di lapangan dan membantu peneliti dalam membuat interpretasi yang logis dan akurat. (Sugiyono, 2018 : 335).

3.7.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan langsung di lapangan melalui teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Strategi pengumpulan data difokuskan

untuk menentukan arah dan kedalaman data, sehingga proses pengumpulan data berikutnya menjadi lebih terarah dan mendalam. (Sugiyono, 2018 : 338).

3.7.2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah dari catatan lapangan sejak peneliti menentukan fokus penelitian, agar data lebih terarah, mudah dipahami, dan dapat disimpulkan. (Sugiyono, 2018 : 338-339).

3.7.3. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap mengorganisasikan data ke dalam bentuk naratif, matriks, grafik, jaringan kerja, atau tabel sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola tertentu. Penyajian ini memungkinkan adanya analisis lanjutan dan penarikan kesimpulan yang lebih tajam. (Sugiyono, 2018 : 341).

3.7.4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang ditarik dari data harus diuji kebenarannya melalui proses verifikasi. Peneliti terus melakukan refleksi terhadap data, membandingkan antara data satu dengan lainnya, dan mencari pola-pola hubungan sebab-akibat. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada data yang valid dan terpercaya. (Sugiyono, 2018 : 345).

3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III. 2 : Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																							
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	X																							
2	Pembuatan Proposal			X																					
3	Bimbingan Proposal							X	X	X	X														
4	Seminar Proposal											X													
5	Revisi Proposal												X												
6	Pembuatan Skripsi													X	X	X	X	X	X	X					
7	Bimbingan Skripsi																				X	X	X		
8	Sidang Skripsi																							X	
9	Revisi Skripsi																								X

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi

Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah, khususnya dalam pengelolaan jaringan jalan dan jembatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebagai perangkat daerah, Dinas PUPR bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR berperan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta fasilitas pendukung lainnya yang bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas PUPR merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu, keberadaan dan tugas pokok dinas ini juga diatur dalam beberapa Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, antara lain Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 yang mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah.

Selain itu, terdapat pula Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi.

Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi juga telah memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mendukung proses perencanaan kegiatan infrastruktur.

4.2. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk memahami perkembangan Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi, berikut disajikan sejarah singkat pembentukannya.

Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang dibentuk pada tanggal 17 Oktober 1999, seiring dengan terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu, Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh Bupati Rukiat Safudin.

Dalam mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum yang berkantor di Jalan Limuno Timur, Kabupaten Kuantan Singingi. Seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah, pada tahun 2004, di bawah kepemimpinan Bupati H. Sukarmis, dilakukan penataan kelembagaan dengan memisahkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dari bidang Cipta Karya.

Pemisahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di bawah pimpinan Yuhanes, serta dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait. Penataan kelembagaan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Selanjutnya, pada bulan Februari tahun 2017, berdasarkan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah, nama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air resmi berubah menjadi Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur dan penataan ruang.

Dengan perkembangan tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi terus berupaya meningkatkan kinerja organisasi, salah satunya melalui penerapan sistem informasi dalam mendukung perencanaan kegiatan.

4.3. Visi Misi Lembaga/Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.3.1. Visi

Visinya adalah Mewujudkan Infrastruktur yang handal berwawasan lingkungan untuk mendukung masyarakat sejahtera dan terwujudnya bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkualitas tinggi dan mendukung sektor lain dalam upaya pengembangan wilayah dan permukiman dalam rangka menciptakan Kabupaten Kuantan Singingi yang tertata dengan baik, dinamis dan berkelanjutan.

4.3.2. Misi

- 4.3.2.1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- 4.3.2.2. Membangun dan meningkatkan fungsi jalan Kabupaten.
- 4.3.2.3. Membangun dan meningkatkan kawasan permukiman, pengelolaan sanitasi, drainase dan persampahan, serta penataan bangunan/gedung.
- 4.3.2.4. Menciptakan mekanisme perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.
- 4.3.2.5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan mitra kerja lingkup pekerjaan umum.

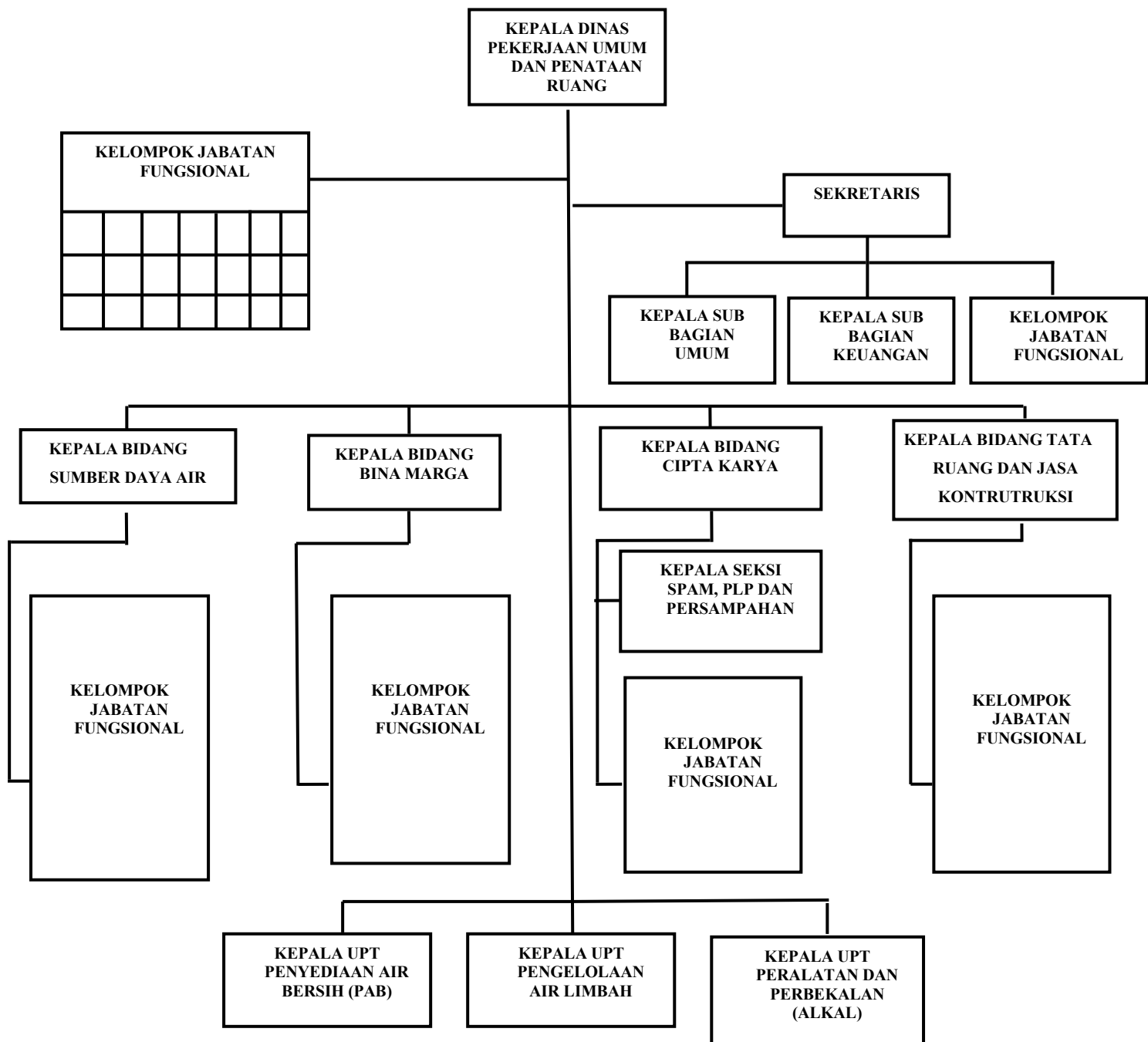
4.4. Struktur Organisasi Lembaga/Instansi

Organisasi merupakan sekumpulan orang yang terkait dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati. Dalam suatu organisasi terdapat pembagian tugas dan tanggungjawab dari setiap anggota atau bagian di dalamnya.

Di samping itu, organisasi juga memiliki fungsi sebagai manajemen, maka kerja sama dalam suatu organisasi sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu organisasi yang bersifat solidaritas. Sebagai pembeda fungsi dan tanggung jawab dari orang-orang yang ada didalamnya, maka dibentuklah suatu tingkatan atau jabatan tersebut, dibentuklah struktur organisasi.

Berikut ini adalah struktur organisasi yang diterapkan pada Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi :

Gambar IV. 1 : Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026

4.5. Tugas Dan Fungsi Lembaga/Instansi

Adapun tugas dan fungsi struktur organisasi Dinas PUPR, dapat di uraikan sebagai berikut:

4.5.1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

4.5.1.1. Tugas Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas mengkoordinasikan seluruh bidang yang ada di lingkungan Dinas PUPR, memastikan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi daerah serta ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah. Selain itu, Kepala Dinas mengambil keputusan strategis serta menjadi penanggung jawab akhir terhadap seluruh urusan PUPR.

4.5.1.2. Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai fungsi dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang PUPR, melakukan pengarahan dan pembinaan terhadap seluruh bidang, secretariat, serta Unit Pelaksana Teknis, melaksanakan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kepada bupati, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan Pembangunan agar sesuai dengan rencana, tujuan, dan ketentuan yang telah di tetapkan.

4.5.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

4.5.2.1. Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi mengelola urusan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, serta dokumentasi kegiatan dinas. Sekretariat juga bertugas memberikan pelayanan administrasi,

mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas PUPR.

4.5.2.2. Fungsi Sekretariat

Berfungsi memberikan dukungan administrasi, meliputi pengelolaan keuangan, kepegawaian, serta urusan umum dan perlengkapan. Sekretariat berperan sebagai pusat layanan internal agar bidang-bidang teknis dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

4.5.3. Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Air

4.5.3.1. Tugas Bidang Sumber Daya Air

Bidang sumber daya air mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, serta pemeliharaan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pertanian, pengendalian banjir, dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, bidang ini bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sumber daya air serta memastikan pengelolaan infrastruktur dilakukan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

4.5.3.2. Fungsi Bidang Sumber Daya Air

Bidang sumber daya air berfungsi Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang sumber daya air, melaksanakan Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan sarana serta prasarana pengairan, melakukan pemeliharaan saluran irigasi dan bendungan guna menjaga keberlangsungan fungsinya, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya air agar berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4.5.4. Tugas dan Fungsi Bidang Bina Marga

4.5.4.1. Tugas Bidang Bina Marga

Bidang bina marga mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jalan serta jembatan guna mendukung kelancaran transportasi dan konektivitas wilayah. Selain itu, bidang ini bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kebinamargaan serta memastikan infrastruktur jalan dan jembatan dapat berfungsi dengan baik untuk menunjang pembangunan daerah secara berkelanjutan.

4.5.4.2. Fungsi Bidang Bina Marga

Bidang bina marga berfungsi melaksanakan pembangunan, peningkatan, serta pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang dapat berjalan lancar. Selain itu, bidang ini berperan dalam menjaga kualitas dan kelayakan infrastruktur jalan dan jembatan, mendukung konektivitas antarwilayah, serta menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan Pembangunan daerah secara berkelanjutan.

4.5.5. Tugas dan Fungsi Bidang Cipta Karya

4.5.5.1. Tugas Bidang Cipta Karya

Bidang cipta karya mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sarana prasarana permukiman, sanitasi, air bersih, dan bangunan gedung, untuk menciptakan lingkungan hunian yang sehat dan layak. Selain itu, bidang ini bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang cipta

karya serta memastikan tersedianya infrastruktur permukiman yang mendukung peningkatan kualitas hidup Masyarakat.

4.5.5.2. Fungsi Bidang Cipta Karya

Bidang cipta karya berfungsi menyusun rencana pembangunan di bidang permukiman dan tata bangunan, melaksanakan pembangunan sarana air bersih, sanitasi, drainase, dan prasarana permukiman, melakukan penataan serta pengawasan pembangunan gedung, serta melaksanakan evaluasi terhadap pembangunan lingkungan permukiman guna mewujudkan kawasan yang tertata, sehat, aman, dan layak huni bagi masyarakat.

4.5.6. Tugas dan Fungsi Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

4.5.6.1. Tugas Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

Bidang tata ruang dan jasa konstruksi mempunyai tugas mengelola perencanaan tata ruang wilayah, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pembinaan jasa konstruksi. Selain itu, bidang ini bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tata ruang dan jasa konstruksi serta memastikan pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

4.5.6.2. Fungsi Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

Bidang tata ruang dan jasa konstruksi berfungsi menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), melaksanakan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang, melakukan penertiban terhadap pelanggaran tata ruang, serta membina penyelenggaraan jasa konstruksi di

daerah guna mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib, aman, dan berkelanjutan serta mendukung pembangunan daerah yang terarah.

4.5.7. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT)

4.5.7.1. Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional yang mendukung tugas Dinas PUPR. Selain itu, Unit Pelaksana Teknis bertugas membantu pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan sesuai dengan bidang tugasnya guna mendukung kelancaran pelayanan kepada Masyarakat dan pencapaian program pembangunan daerah.

4.5.7.2. Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis berfungsi melayani kebutuhan air bersih masyarakat melalui Unit Pelaksana Teknis Penyediaan Air Bersih, mengelola sistem pembuangan limbah cair melalui Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah, serta mengelola, menyewakan, dan merawat alat berat milik dinas melalui Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan. Selain itu Unit Pelaksana Teknis berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang PUPR.

4.5.8. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

4.5.8.1. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian profesional seperti perencana, pengawas konstruksi, arsitek, maupun insinyur. Selain itu, kelompok jabatan fungsional bertugas

memberikan dukungan teknis sesuai bidang keahliannya guna menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas PUPR.

4.5.8.2. Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mendukung tugas bidang-bidang dalam hal teknis perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur. Selain itu, kelompok jabatan fungsional berperan memberikan pertimbangan dan rekomendasi teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program serta Pembangunan infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SIPD dalam proses perencanaan kegiatan infrastruktur sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari proses penginputan data yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan perencanaan, pemanfaatan fitur perencanaan SIPD yang membantu penyusunan program dan kegiatan secara lebih sistematis, serta kemampuan SIPD dalam mendukung proses perencanaan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

6.2. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 6.2.1. Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas data yang diinput ke dalam SIPD melalui pengecekan dan verifikasi data secara berkala agar data yang digunakan dalam proses perencanaan semakin lengkap dan akurat.

- 6.2.2. Pegawai yang menggunakan SIPD diharapkan terus meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan sistem sehingga pemanfaatan fitur-fitur SIPD dapat dilakukan secara lebih optimal.
- 6.2.3. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas jaringan internet dan stabilitas server untuk mendukung kelancaran penggunaan SIPD.
- 6.2.4. Perlu adanya peningkatan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam proses verifikasi dan persetujuan data agar proses perencanaan kegiatan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Afifudin. 2015. *Administrasi dan Organisasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Aflah, M., & Lestari, D. 2021. *Evaluasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Engkus. 2022. *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi serta Perubahan)*. Bekasi: PT Kimshafi Alung Cipta.
- Hidayat, R. 2019. *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Indrajit, R. E. 2016. *Konsep dan Aplikasi E-Government*. Jakarta: Gramedia.
- Jogiyanto, H. M. 2017. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Kadir, Abdul. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Kusrini. 2014. *Konsep dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mahmudi. 2019. *Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moeljodiharjo, B. 2015. *Pengantar Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Munir, R. 2016. *Pengantar Sistem Informasi*. Bandung: Informatika.
- Ngusmanto, 2015. *Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. 2017. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pratama, A. D. 2016. *Sistem Informasi Manajemen dalam Dunia Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Priharto, R. 2019. *Manajemen Sistem Informasi*. Bandung: Pustaka Setia.

- Purwanto, A. 2019. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ramadhania, S. 2014. *Konsep Sistem Informasi Manajemen*. Surabaya: Media Sains Indonesia.
- Sahya Anggara, et al. 2016. *Administrasi Pembangunan: Konsep dan Dinamika*. Bandung: Alfabeta.
- Salusu, J. 2016. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Sedarmayanti. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S. P. 2012. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. 2016. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, sondang P. 2014. *Teori dan pratek pengambilan Keputusan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surjarweni, V. Wiratna. 2018. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sutabri, T. 2012. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutiyadi, D. 2017. *Pengantar Sistem Informasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Andi.
- Tangkilisan, H. 2017. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Uddin, S. 2017. *Kebijakan Publik: Konsep, Proses, dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, J. 2018. *Good Governance: Telaah dari Perspektif Administrasi Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yusuf, R. 2022. *Digitalisasi Perencanaan Daerah: Strategi dan Implementasi SIPD*. Jakarta: Prenada Media.

B. Jurnal :

Herdiana, D. 2018. *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 17.

C. Undang-Undang :

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyediaan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Alat dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Internet :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi. 2023. *Laporan Profil Instansi*. Kuantan Singingi.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. 2023. *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kuantan Singingi*. Diakses dari <https://kuansing.go.id>

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. 2024. *Perencanaan Infrastruktur Melalui SIPD Tahun Anggaran 2024*. Diakses dari <https://kuansing.go.id>

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepada : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Identitas Peneliti

Nama	: Risma Cantika Sastra
NPM	: 220411077
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No	:
Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan wawancara untuk Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Penginputan Data SIPD

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam penginputan data perencanaan kegiatan infrastruktur ke dalam SIPD ?

Berikan Ulasan

.....

2. Apakah data yang di input ke dalam SIPD sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan ?

Berikan Ulasan

.....

3. Bagaimana ketepatan data yang di input ke dalam SIPD ?

Berikan Ulasan

.....

B. Pemanfaatan Fitur Perencanaan SIPD

1. Seberapa sering fitur perencanaan SIPD digunakan dalam perencanaan kegiatan infrastruktur ?

Berikan Ulasan

.....

2. Fitur apa saja dalam SIPD yang paling membantu dalam proses penyusunan perencanaan ?

Berikan Ulasan

.....

3. Bagaimana kemudahan dalam mengakses dan menggunakan fitur perencanaan SIPD ?

Berikan Ulasan

.....

.....

C. Kendala Penggunaan SIPD

1. Kendala teknis apa saja yang sering terjadi dalam penggunaan SIPD pada perencanaan kegiatan infrastruktur ?

Berikan Ulasan

.....

.....

2. Bagaimana kestabilan sistem SIPD saat digunakan ?

Berikan Ulasan

.....

.....

3. Hambatan prosedural apa saja yang dihadapi dalam penggunaan SIPD ?

Berikan Ulasan

.....

.....

**DOKUMENTASI PENELITIAN TENTANG ANALISIS PENGGUNAAN
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM
PERENCANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR DI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



Gambar I : Dokumentasi dengan Kepala Sub Bagian Umum



Gambar II : Dokumentasi dengan Pegawai Bidang Pemograman



Gambar III : Dokumentasi dengan Pegawai Bidang Sumber Daya Air



Gambar IV : Dokumentasi dengan Pegawai Bidang Tata Ruang dan
Jasa Kontruksi



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax 0760-561655, e-mail: uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 062/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Memperhatikan :** Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menunjuk :

- a. Pembimbing I : Alsar Andri, S.Sos., M.Si
NIDN : 1005108901
- b. Pembimbing II : Sarjan M, S.Sos., M.Si
NIDN : 1008128002

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Risma Cantika Sastra
 NPM : 220411077
 Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
 PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025
 Dekan,

Rika Ramadhanti
RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
 NIDN. 1030058402

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Kuantan Singingi Telp. (0760) 561624, 561625
TELUKKUANTAN – 29562

Teluk Kuantan, 22 April 2026

Nomor : 600/PUPR-SEKR/IV/2026/1027
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Jawaban Permohonan Riset**

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Ilmu sosial
 Universitas Islam Kuantan Singingi
 di-

Teluk Kuantan

Sehubungan dengan surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi No : 46/DPMPTSPK-PTSP/1.04.02.02/2026 tanggal 06 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dengan Judul “Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi”, untuk menghasilkan lulusan yang berkompetensi dan memiliki daya saing tinggi dibidangnya, serta mampu menjadi agen perubahan.

Surat Rekomendasi kami setuju dengan rincian nama mahasiswa yang akan melakukan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

Nama : Risma Cantika Sastra
 NPM : 220411077
 Program Studi : Administrasi Negara

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ABDUL FAHREH ARIF, ST
 P. 0800001 K. I (IV/b)
 NP. 19760616 200501 1 010



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
 Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
 0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : RISMA CANTIKA SASTRA

NPM : 220411077

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si

2. SARJAN.M, S.Sos., M.Si

JUDUL : Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
	14-04-2026	Isi Tulang		/	
	14-04-2026	Tambahkan pekerjaan di identitas responden	Ay		
		Merarikan Penulisan Pertanyaan wawancara	Ay		
		Memperbaiki format daftar wawancara	Ay		



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655,e-mail uniksquantan@gmail.com

Form 1.2

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Risma Cantika Sastra
 NPM : 220411077
 Program Studi : Administrasi Negara
 Judul : Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD) dalam
 Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
 Ruang Kabupaten Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 15 Januari 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Form 11

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Risma Cantika Sastra**
 NPM : 220411077
 Program Studi : Administrasi Negara
 Judul : Analisis Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
 Dalam Perencanaan Kegiatan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan
 Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.

Hari/Tgl Ujian : Selasa / 28 Juli 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Desriadi, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Alsar Andri, S.IP., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Risvandi, S.Pd.I., M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Risma Cantika Sastra
 Tempat/Tanggal Lahir : Taluk Kuantan/4 Agustus 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Belum Menikah
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Dusun Pulau Lowe Teratak Air Hitam
 Alamat Email : cantikarisma6@gmail.com
 Pendidikan : 1. Tahun 2014 LULUS SD 023 Dwipa Abadi Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir
 2. Tahun 2017 LULUS SMP Dwipa Abadi Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir
 3. Tahun 2020 LULUS SMK Negeri 1 Benai Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 28 Juli 2026
Penulis

RISMA CANTIKA SASTRA
NPM.220411077